

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui pengolahan data menggunakan *SmartPLS* versi 4 , maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan ($p\text{-value } 0,000 < 0,05$; $t\text{-statistik } 4,889 > 1,96$), sehingga H_1 diterima. Artinya, semakin tinggi kompetensi, semakin baik akuntabilitas keuangan. Indikator paling dominan adalah keterampilan, khususnya kemampuan aparatur menyelesaikan pekerjaan keuangan secara efisien dan tepat waktu. Di Kabupaten Cirebon, hal ini tercermin dalam tuntutan penyusunan laporan, pengelolaan anggaran, dan pertanggungjawaban yang akurat. Pemerintah daerah mendukung peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pembinaan, dengan realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 94,94% (kategori sangat tinggi). Selain keterampilan teknis, sikap profesional, disiplin, dan tanggung jawab aparatur juga memperkuat peningkatan akuntabilitas keuangan.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan ($p\text{-value } 0,257 > 0,05$; $t\text{-statistik } 1,133 < 1,96$), sehingga H_2 ditolak. Artinya, penerapan SAP belum mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan secara signifikan. Hal ini disebabkan penerapan SAP yang belum optimal dan masih bersifat administratif, keterbatasan pemahaman serta kemampuan teknis aparatur, serta latar belakang pendidikan yang kurang relevan karena hanya 27 dari 100 responden berlatar belakang akuntansi. Kondisi tersebut menghambat efektivitas penerapan SAP dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.
3. Transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan ($p\text{-value } 0,001 < 0,05$; $t\text{-statistik } 3,476 > 1,96$),

sehingga H₃ diterima. Artinya, semakin tinggi transparansi, semakin meningkat akuntabilitas keuangan. Di Kabupaten Cirebon, transparansi sudah berjalan baik melalui keterbukaan informasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Indikator utama adalah ketersediaan informasi kinerja, seperti publikasi LAKIP yang dapat diakses masyarakat. Hal ini meningkatkan pengawasan publik, akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan transparansi anggaran terhadap akuntabilitas keuangan daerah di Kabupaten Cirebon, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi

Pemerintah Kabupaten Cirebon disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan melalui pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, serta program pengembangan kapasitas lainnya yang dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan kompetensi perlu difokuskan pada keterampilan teknis pengelolaan keuangan, pemahaman regulasi, penyusunan laporan keuangan, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan pengembangan sikap profesional, disiplin, dan tanggung jawab aparatur agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan akuntabel.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, Pemerintah Kabupaten Cirebon disarankan untuk meningkatkan implementasi SAP secara lebih optimal dan tidak hanya bersifat administratif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman aparatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pelatihan teknis penyusunan laporan keuangan

berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta pendampingan secara berkala kepada aparatur pengelola keuangan di setiap perangkat daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kesesuaian latar belakang pendidikan aparatur yang menangani keuangan agar penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dapat berjalan lebih efektif.

3. Transparansi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Cirebon disarankan untuk terus meningkatkan transparansi anggaran melalui penyediaan informasi keuangan dan informasi kinerja yang lebih mudah diakses, lengkap, serta tepat waktu kepada masyarakat. Keterbukaan informasi dapat dilakukan melalui optimalisasi website resmi pemerintah daerah, publikasi dokumen anggaran dan laporan kinerja, serta pemanfaatan media digital lainnya. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah agar tercipta pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.

4. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi akuntabilitas keuangan daerah, seperti sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, maupun budaya organisasi. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek penelitian pada daerah lain agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat dibandingkan antar daerah.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi

Pemerintah Kabupaten Cirebon direkomendasikan untuk menyusun program pengembangan kompetensi aparatur secara terencana dan berkelanjutan, khususnya bagi aparatur pengelola keuangan daerah.

Program tersebut dapat berupa pelatihan teknis pengelolaan keuangan, sertifikasi kompetensi, bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan, serta evaluasi kompetensi aparatur secara berkala. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pemerataan kesempatan pelatihan bagi seluruh aparatur agar kemampuan pengelolaan keuangan dapat meningkat secara merata.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pemerintah Kabupaten Cirebon direkomendasikan untuk memperkuat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui pengawasan, evaluasi, dan pendampingan teknis pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan melalui rekrutmen atau penempatan aparatur yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi maupun keuangan agar implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat berjalan lebih optimal dan konsisten.

3. Transparansi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Cirebon direkomendasikan untuk mengembangkan sistem keterbukaan informasi keuangan daerah yang lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Publikasi dokumen seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), realisasi anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta laporan pertanggungjawaban keuangan perlu dilakukan secara berkala dan transparan melalui media digital resmi pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

4. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan variabel tambahan yang relevan agar dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas

keuangan daerah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda agar hasil penelitian menjadi lebih beragam dan komprehensif.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**